



SERTIFIKAT

NO : 160/LPPM UPI Y.A.I/X/2022

Diberikan kepada :

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Sebagai

PEMAKALAH

Dengan Judul

Peningkatan Pemahaman Mengenai Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Malaka pada Perbatasan Negara antara Indonesia dan Timor Leste

Dalam Kegiatan Seminar Nasional Industri Kreatif, Teknologi & Humaniora yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Persada Indonesia Y.A.I pada tanggal 01 Oktober 2022.

Jakarta, 01 Oktober 2022

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

Rektor,



Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D



LPPM UPI Y.A.I

Direktur,



Dr. Sularso Budilaksono, M.Kom



Semnas IKRA-ITH
Universitas Persada Indonesia YAI

Peningkatan Pemahaman Mengenai Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Malaka pada Perbatasan Negara antara Indonesia dan Timor Leste

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹,
Suzanna Josephine L.Tobing², Rutman Lumbantoruan³, Anton Nomleni⁴, Santi Lina⁵

^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia
⁴ Universitas Matana ⁵ Universitas Kristen Maranatha

Email: posmahutasoit@gmail.com¹, suzannajosephine@gmail.com²,
rutman.toruan@gmail.com³, anton.nomleni@matanauniversity.ac.id⁴,
santilina@gmail.com⁵

ABSTRAK

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan kesehatan, salah satu aspek kesejahteraan dan fokus utama pembangunan manusia. Upaya menghindari kerawanan pangan dialami di daerah dengan kondisi alam dan curah hujan yang relatif sedikit, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Malaka, wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman bahwa Kabupaten Malaka memiliki ketahanan pangan dengan melihat Program Revolusi Pertanian (RPM) Malaka, yaitu kebijakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Laporan kegiatan ditulis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif sederhana. Sumber data berasal dari berbagai literatur dan diskusi dengan pemerintah (Bupati) dan masyarakat Kabupaten Malaka. Program RPM berdampak positif terhadap kinerja agronomi (padi, jagung, dan bawang merah) sehingga dapat meningkatkan produktivitas, produksi pertanian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program RPM, antara lain faktor internal (pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh program RPM) dan faktor eksternal (iklim, ketersediaan pupuk, teknologi, dll).

Kata Kunci: *Ketahanan Pangan, Kesehatan, Kabupaten Malaka, Kawasan Perbatasan, Timor Leste.*

ABSTRACT

Food security is closely related to health, one aspect of well-being and the main focus of human development. Efforts to avoid food insecurity are experienced in areas with natural conditions and relatively little rainfall, such as the Nusa Tenggara Timur Province, especially in the Malaka Regency, the border area of Indonesia-Timor Leste. This community service activity aims to deepen understanding of Malaka Regency has food security by looking at the Malaka Agricultural Revolution Program (RPM), the policy to increase community economic productivity. We are writing this activity with a descriptive method using a simple qualitative approach. Data sources come from various literature and discussions with the government (Bupati) and the people of Malaka Regency. The RPM program positively impacts agronomic performance (rice, corn, and shallots) so that it can increase productivity, agricultural production, income and community welfare. However, there are still factors that hinder the implementation of the RPM Program, including internal factors (knowledge, skills and attitudes of farmers in dealing with changes brought about by the RPM program) and external factors (climate, availability of fertilizers, technology, etc).

Keywords: Food Security, Health, Malaka Regency, Border Area, Timor Leste.

1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan persepsi tentang situasi hubungan antara manusia dengan kebutuhan akan pangan. “Makanan adalah komoditas yang biasa dimakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai saat ini konsep tersebut telah mengalami banyak perubahan, yaitu pada skala global, nasional, rumah tangga, dan individu, dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) ke perspektif mata pencaharian dan dari indikator objektif ke persepsi (Lassa, 2009)”. Menurut *United Nation Food Agency* (FAO), yang dikutip dari Suryana (2008), “Ketahanan pangan digambarkan sebagai suatu kondisi di mana semua orang terus memiliki akses terhadap makanan yang aman dan bergizi untuk mempertahankan kehidupan yang aktif dan sehat. Ketahanan pangan memiliki tiga dimensi, yaitu: Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang sesuai dan disediakan melalui produksi dalam negeri atau impor; Aksesibilitas rumah tangga dan individu terhadap makanan yang sesuai untuk diet bergizi; dan Keterjangkauan Individu untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi berdasarkan latar belakang budaya, dan pilihan individu mereka”. (Nursalam, 2010)

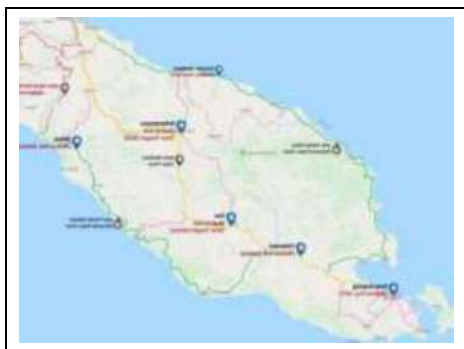
Menurut Timmer (2005), “Ketahanan pangan memiliki tiga dimensi, yaitu: Ketersediaan pangan yang cukup dalam hal kualitas yang baik dan dipasok melalui produksi dalam negeri dan impor; Akses oleh rumah tangga dan individu ke makanan yang layak; Pemanfaatan pangan melalui pangan yang cukup, air bersih, sanitasi, dan pemeliharaan kesehatan”. “Persyaratan ketahanan pangan masyarakat tidak hanya pada pengadaan bahan pangan tetapi juga aksesibilitas pangan bagi mereka yang lapar. Ketimpangan dalam distribusi dan bahayanya terhadap pertumbuhan ekonomi, seringkali jauh dari harapan di negara-negara berkembang, telah lama

diketahui. Dalam konteks lokal, ketahanan pangan membutuhkan sistem tersendiri yang lebih fokus pada kondisi lokal (Nursalam, 2010).” “Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek dasar dari masalah ketahanan pangan di Indonesia, dimana masalah ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pangan dan kapasitas produksi yang semakin terbatas. Namun, kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk (BKP, 2017).” (Raydais & Damayanti, 2018)

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan kesehatan. “Salah satu aspek kesejahteraan dan fokus utama pembangunan manusia. Karena kesehatan merupakan aset berharga bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas hidupnya, maka daerah ini paling sering mengalami kerawanan pangan yang memiliki berbagai implikasi seperti gizi buruk, gizi buruk pada balita, dan kelangkaan pangan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, Pemerintah melakukan berbagai program seperti penambahan pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Sasaran utama pembangunan kesehatan adalah meningkatkan harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang. Tingkat kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari indikator kesehatan, seperti kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, dan gizi buruk, yang berada di atas tingkat nasional. Tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil di NTT disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil (Trigutomo, 2017).” (Nursalam, 2010)

“Menurut Bhuja (2010), sistem ketahanan pangan yang diterapkan di NTT belum responsif terhadap perubahan yang terjadi. Ada dua alasan untuk ini: Komponen dasar yang digunakan untuk membangun sistem ketahanan pangan daerah sangat terpusat, dan Rendahnya

komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk membangun tanaman pangan dan kelompok tani mandiri. Sistem ketahanan pangan yang dilaksanakan bergantung pada pusat dan daerah lain, tidak berakar/berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, pilihan strategis adalah membangun dan mengembangkan kekuatan sistem ketahanan pangan yang bertumpu pada sumber dayanya. Pemerintah Provinsi NTT berupaya mengatasi masalah ketahanan pangan dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang berupaya meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan masyarakat. Yakni melalui kebijakan antara lain Program Operasi Nusa Makmur (ONM), Program Operasi Nusa Hijau (ONH), Program Peningkatan Pendapatan Asli Rakyat (Gempar), Program Pembangunan Desa (Gerbadess).” (Nursalam, 2010)



Gambar 1. Peta Pulau Timor NTT

Kabupaten Malaka merupakan daerah otonom baru di Provinsi NTT, hasil pemekaran dari Kabupaten Belu. Ini dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di NTT, dengan pusat pemerintahan terletak di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Kabupaten Malaka Tengah, sebagai pusat Kabupaten Malaka, mengalami perkembangan pesat dengan adanya pemisahan Kabupaten Malaka.

“Kabupaten Malaka merupakan salah satu daerah perbatasan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, termasuk sektor pertanian (Priyanto &

Diwyanto, 2014). Program pembangunan pertanian merupakan salah satu kebijakan yang dianggap relevan untuk dikembangkan di Kabupaten Malaka. Untuk mewujudkan tidak dapat dipisahkan maksud dan tujuan pembangunan pertanian dari pengelolaan program/kegiatan, dimana secara konseptual program dirumuskan untuk rancangan-rancangan pembangunan yang kemudian diimplementasikan dalam kegiatan (Iqbal, 2007).” (Raydais & Damayanti, 2018)

“Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pendapatan daerah Kabupaten Malaka. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malaka tahun 2018 sebesar 40%. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 60,3% dari angkatan kerja pada tahun 2017 (BPS-Malaka, 2018). Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malaka menekankan: (a) peningkatan kapasitas penyuluh pertanian; (b) perbaikan infrastruktur pertanian; (c) memberikan pendampingan dan fasilitasi petani untuk meningkatkan produksi melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan mekanisasi pertanian; (d) memfasilitasi petani dengan menerapkan manajemen pasca panen; dan (e) peningkatan kualitas produksi komoditas pertanian dan perkebunan” (RPJMD-Malaka, 2016; Seran, 2019).

Implementasi kebijakan sektor pertanian yang dikembangkan adalah “Program Revolusi Pertanian (RPM) Malaka. Program RPM diluncurkan dengan pertimbangan bahwa: (a) Kabupaten Malaka memiliki wilayah pertanian yang luas yaitu persawahan seluas 11 ribu ha dan lahan kering 19 ribu ha, (b) kualitas lahan yang subur, (c) sistem pertanian tradisional, (d) kasus kelaparan terjadi hampir setiap tahun, dan (e) masih banyak keluarga berpenghasilan rendah yaitu pada tahun 2016 ada 15.495 keluarga berpenghasilan rendah” (GD RPM, 2016; BPS-Malaka, 2018; TPHP,

2019; Seran 2019). “Program RPM bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, mempercepat kesejahteraan petani, dan mewujudkan Kabupaten Malaka sebagai salah satu kabupaten yang sejahtera dalam penyediaan pangan (Undana, 2016). Pelaksanaan program tersebut direncanakan selama lima tahun, dari 2016-2021, dengan salah satu komoditas yang dikembangkan adalah beras.” (Raydais & Damayanti, 2018)

2. PERMASALAHAN

Kabupaten Malaka merupakan Daerah Otonom Baru dengan salah satu sektor basisnya adalah pertanian (BP4D, 2017). “Tidak mudah menjalankan program percepatan di kabupaten baru seperti Malaka yang juga merupakan daerah perbatasan. Daerah perbatasan diidentikkan dengan citra daerah pedesaan, pinggiran kota, daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung terpinggirkan (Raydais & Damayanti, 2018). Dengan infrastruktur yang terbatas, sumber daya manusia yang rendah, akses ke kelembagaan petani, keuangan, pasar, kegiatan ekonomi yang terbatas, dan kurangnya pengelolaan sumber daya yang ada secara berkelanjutan.” (Raydais & Damayanti, 2018)

3. METODOLOGI

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana Kabupaten Malaka meningkatkan ketahanan pangannya dengan melihat kebijakan Revolusi Pertanian Malaka (RPM) untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Penulisan laporan kegiatan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sederhana. Sumber data berasal dari berbagai literatur dan diskusi dengan Pemerintah (Bupati), dan masyarakat di Kabupaten Malaka,

daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), antara Negara Indonesia dan Timor Leste.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan program RPM, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program RPM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik atau masalah. Pelaksanaan dimulai dengan perencanaan, persiapan, dan pertemuan pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Kegiatan ini didasarkan pada penelitian di daerah perbatasan yang kami lakukan tentang peran pertahanan dan keamanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan (Kennedy, 2021).



Gambar 2. Kunjungan ke Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Meningkatkan Kesehatan dan Ketahanan Pangan di NTT

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan kesehatan. “Salah satu aspek kesejahteraan dan fokus utama pembangunan manusia. Karena kesehatan merupakan aset berharga bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas hidupnya, maka daerah ini paling sering mengalami kerawanan pangan yang memiliki berbagai implikasi seperti gizi buruk, gizi buruk pada balita, dan kelangkaan pangan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, Pemerintah melakukan berbagai program seperti penambahan pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Sasaran utama pembangunan kesehatan adalah meningkatkan harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang. Tingkat kesehatan masyarakat di NTT belum menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari indikator kesehatan, seperti kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, dan gizi buruk yang berada di atas tingkat nasional. Tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil di NTT disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil. (Trigutomo, 2017)

Ketersediaan tenaga kesehatan di NTT masih terbatas dan belum merata. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di NTT pada tahun 2014 masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk NTT yaitu 1:472 (1 tenaga kesehatan harus melayani 472 orang). Angka kematian bayi di NTT pada tahun 2012 adalah 45 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Angka kematian bayi di NTT adalah 57 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian balita mencapai 58 kematian per 1000 kelahiran hidup, turun dari kondisi 2007 sebesar 86 kematian per 1000 kelahiran hidup. (BPS-NTT, 2014)

Upaya menghindari kerawanan pangan yang dialami daerah dengan kondisi alam dan curah hujan yang relatif sedikit, seperti Provinsi NTT, memerlukan kebijakan dengan kondisi alam agar lebih mudah dalam pelaksanaannya. Menurut Pakpahan dan Pasandaran (1990), ketahanan pangan adalah hasil interaksi antara teknologi, sumber daya alam, modal, dan sumber daya manusia yang terkoordinasi baik melalui pasar atau mekanisme regulasi lainnya seperti kebijakan pemerintah yang mengatur program produksi pertanian. (Trigutomo, 2017)

Dalam program Pemerintah tentang ketahanan pangan di NTT, masyarakat didorong untuk meningkatkan capaian produk pangan seperti beras, jagung, dan kedelai. Beras merupakan bahan makanan utama di NTT. Produksi beras di Provinsi NTT cenderung meningkat selama tahun 2011 – 2015. Pada tahun 2014 produksi beras mengalami penurunan sebesar 3,51 persen atau 77.061 ton. Hal ini sejalan dengan penurunan luas panen padi sebesar 0,99 persen atau 4.345 ha. Selama sepuluh tahun terakhir, produksi beras di NTT cenderung meningkat 4,95 persen per tahun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produktivitas sebesar 1,31 persen dan luas panen sebesar 3,43 persen. Luas panen padi pada musim tanam tahun ini meningkat 8,97 persen, dan produktivitas meningkat 4,80 persen. NTT sudah memiliki beberapa sentra produksi beras untuk memenuhi target panen padi. Secara kumulatif, target tersebut bisa kita capai dengan memanfaatkan lahan seluas 126.000 hektar yang tersebar di kabupaten dan kota.” (Trigutomo, 2017)

Pemerintah juga mengupayakan pembangunan infrastruktur dan perbaikan irigasi, seperti irigasi tersier, waduk, dan bendungan. Bantuan alat pertanian seperti mesin giling, mesin perontok, traktor, dan pompa air juga diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi. (BPS-NTT, 2014)

4.2 Profil Kabupaten Malaka

“Kabupaten Malaka secara astronomis terletak pada koordinat $124^{\circ} - 88^{\circ} 0' 25''$ BT dan $9^{\circ} - 10,26^{\circ}$ LS. Secara geografis Kabupaten Malaka berbatasan di utara dengan Kabupaten Belu, di selatan dengan Laut Timor, di timur dengan Republik Timor Leste, dan di barat dengan Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS). kabupaten. Secara klimatologis, Kabupaten Malaka beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata $27,6^{\circ}\text{C}$ dengan kisaran antara $21,5^{\circ}\text{C} - 33,7^{\circ}\text{C}$. Suhu terendah terjadi pada bulan Agustus, dan suhu tertinggi terjadi pada bulan November. Unsur iklim lainnya berupa curah hujan dan jumlah hari hujan sangat bervariasi sepanjang tahun. Hujan terjadi pada bulan November dengan curah hujan rata-rata 218,7 mm sampai dengan bulan Juni dengan curah hujan rata-rata 717 mm. Selama periode ini, dua titik curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Juni. Curah hujan satu tahun tercatat sebesar 1.319 mm dengan 73 hari hujan (BPS-Malaka, 2018).

Jumlah penduduk Malaka tahun 2017 sebanyak 186.312 jiwa, terdiri dari 90.121 penduduk laki-laki dan 96.191 penduduk perempuan yang menempati wilayah Kabupaten Malaka seluas 1.160,63 Km² dengan kepadatan penduduk 161 jiwa/Km². Jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki, dengan rasio 93,68 dan komposisi ini ada di semua kecamatan (BPS Malaka, 2018). Tenaga kerja di Kabupaten Malaka pada tahun 2017 sebanyak 135.831 orang yang terdiri dari 134.513 orang yang bekerja dan 1.318 orang yang tidak bekerja atau menganggur. Angka kemiskinan di Kabupaten Malaka masih tinggi, meskipun cenderung menurun. Pada tahun 2016, terdapat 31.140 orang yang dikategorikan miskin. Rangkaian data kemiskinan sejak tahun 2006, ketika masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Belu, terdapat tujuh puluh

sembilan ribu penduduk miskin dan terus menurun hingga tahun 2016. Pada tahun 2014 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin dan penurunan. di tahun berikutnya.” (Seran, 2019)



Gambar 3. Diskusi dengan Bupati Kabupaten Malaka, NTT

“Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Malaka memiliki 12 kecamatan dan 127 desa. Luasnya 1.160,63 km² (BPS Malaka, 2018). Pada tahun 2018, luas panen padi sawah adalah 7908 ha, menghasilkan 36.766 ton Gabah Kering Panen (GKP). Luas panen jagung 26.018 ha dengan produksi 84.183 ton. Luas panen bawang merah adalah 260 ha dengan produksi 2.735,95 ton (Kantor TPHP, 2019). Kabupaten Malaka memiliki infrastruktur irigasi sebanyak 13 Daerah Irigasi (DI). Yaitu DI Weliman, DI Mota Delek, DI Tolok, DI Wemaromak, DI Wematek, DI Wemarilin, DI Lakekun, DI Tubaki, DI Bakateu, DI Obor II, DI Weharani, DI Rabasa, dan DI Webu dengan rincian panjang irigasi saluran sepanjang 180 km, sejauh ini mereka sudah mampu mengairi 6.000 hektar sawah. Terdapat satu bendungan teknis yaitu Bendungan

Benanai dengan kapasitas 13 m 3 detik -1 (GD-RPM, 2016).”

4.3 Program Revolusi Pertanian Malaka (Seran, 2019)

Program Revolusi Pertanian (RPM) Malaka merupakan, “salah satu program pertanian di Kawasan Perbatasan Kabupaten Malaka untuk mendukung ketersediaan pangan. Pelaksanaan program ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam peran dan kapasitasnya (Raydais & Damayanti, 2018)”.

“Program Revolusi Pertanian (RPM) Malaka, khususnya untuk usahatani padi, jagung, dan bawang merah, terutama difokuskan pada (a) penyediaan sarana produksi pertanian, (b) bantuan dan bimbingan teknis di lapangan, dan (c) mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dalam bertani. Produk pertanian berikut ini diprioritaskan (Seran, 2019):

1. Sawah. Dalam Program RPM ini, petani mengalami beberapa perubahan dalam usaha taninya, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman hingga panen dan penanganan pasca panen. Perubahan fisik (adanya inovasi) menyebabkan perubahan pengetahuan, wawasan, dan sikap terhadap teknologi. Dampak Program RPM terutama penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih memadai, dimulai dengan penyiapan lahan yang lebih luas dengan menggunakan traktor tangan, VUB, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Produksi padi sawah juga meningkat dari 2,9 ton/ha menjadi 4,9-5 ton/ha. Perubahan ini mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat (petani). Peningkatan produksi akan mempengaruhi pendapatan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Jagung. Dalam usahatani jagung, petani juga mengalami perubahan inovasi teknologi, sarana produksi pertanian, dan pola pendampingan. Hal ini menyebabkan perubahan pola pikir, wawasan, dan sikap petani terhadap teknologi. Dampak Program RPM terhadap usahatani jagung terutama penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih memadai, dimulai dengan penyiapan tanah menggunakan traktor secara lebih luas, penggunaan VUB, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Produksi jagung meningkat dari 2,1 ton/ha menjadi 3,7-4 ton/ha. Perubahan ini mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat (petani). Peningkatan produksi akan mempengaruhi pendapatan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Bawang merah. Usahatani bawang merah merupakan usaha dengan komoditas baru yang diperkenalkan melalui Program RPM. Inovasi yang diperkenalkan melalui Program RPM adalah (1) inovasi berlabel VUB (bima Brebes dan super Philips), (2) perlakuan pra tanam (fungisida) untuk mencegah penyakit jamur terutama bercak ungu, dan (3) deteksi dini hama/penyakit. Fokus pada pengendalian bercak ungu (*alternaria porcini*), antraknosa, dan layu fusarium, (4) panen tepat waktu, penanganan pasca panen yang tepat, dan peningkatan nilai tambah (agroindustri skala rumahan).

(Seran, 2019)”

“Kinerja keluaran sebagai tolak ukur diseminasi adalah (1) produktivitas yang diperoleh cukup baik, rata-rata 12 ton/ha, dan (2) terjadi perubahan sosial terutama pada alokasi jam kerja yang lebih panjang untuk usahatani bawang merah, dimana saat panen raya sudah sampai tengah malam yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan bahkan remaja, (3) karena nilai ekonomi bawang merah yang cukup besar menyebabkan banyak

lahan yang sebelumnya tidak digarap menjadi lahan garapan baru. Indeks tanam bawang merah naik menjadi 2-3 kali lipat karena musim hujan pertama dan kedua mengubah banyak lahan yang sebelumnya ditanami jagung menjadi bawang merah.” (Rubiyo et al., 2019)



Gambar 4. Diskusi dengan Masyarakat/Petugas Perbatasan di Kabupaten Malaka, NTT

4.4 Hambatan Pelaksanaan Program RPM (Seran, 2019)

Pelaksanaan program RPM ini pada musim tanam pertama tahun 2017, dan telah dilakukan evaluasi. “Dua sumber diidentifikasi sebagai masalah dalam program RPM: internal dan eksternal petani. Faktor internal petani menjadi penyebab permasalahan dalam Program RPM, yaitu:

1. Pengetahuan dan wawasan tentang budidaya padi, jagung, dan bawang merah relatif rendah, sehingga mereka terus menerapkan teknologi lama, dan menjadi sulit menerima teknologi baru.
2. Petani masih belum percaya dengan teknologi baru, sikap menunggu dan ingin selalu ditolong, serta sikap

malas, acuh, dan cuek. Karena menganggap lahan pertanian mereka subur, tidak membutuhkan kerja keras dan penggunaan teknologi dengan banyak fasilitas produksi.

3. Keterampilan petani dalam menerapkan teknologi masih rendah sehingga menghambat difusi dan adopsi inovasi teknologi pertanian khususnya melalui Program RPM.

Faktor eksternal petani yang menghambat Program RPM antara lain perubahan iklim, masalah dalam proses budidaya, teknologi yang direkomendasikan terkait pengaturan dan jarak tanam padi, inovasi sistem tanam jagung dalam program RPM, dan produksi pertanian musiman yang tidak dapat disimpan (bawang merah).” (Seran, 2019)

Selain hal-hal tersebut di atas, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman bersama para pemangku kepentingan masih menjadi kendala pelaksanaan Program RPM dalam melaksanakan Program RPM. “Kondisi ini tentunya dapat mempengaruhi pelaksanaan peran masing-masing pemangku kepentingan. Diperlukan proses kolaboratif untuk mengarahkan pemangku kepentingan dalam mencapai pemahaman bersama tentang keterlibatan dan peran mereka dalam mewujudkan tujuan program. Namun, menurut Ansell & Gash (2008), kondisi yang dipertimbangkan dalam kolaborasi adalah kapasitas para pemangku kepentingan.” (Raydais & Damayanti, 2018)

Namun, program ini perlu dilanjutkan untuk membangun kemandirian petani demi keberlanjutan usaha tani. “Yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani tentang teknik budidaya padi, jagung, dan bawang merah yang baik melalui pelatihan, magang, dan kunjungan silang ke lokasi atau petani yang telah berhasil menerapkan teknologi dengan baik.

2. Perubahan sikap petani terhadap inovasi teknologi pertanian dilakukan dengan terus menerus memberikan pendampingan, meyakinkan petani tentang teknologi yang digunakan, dan dampak penggunaan teknologi maju terhadap produksi, pendapatan, dan kesejahteraan.
3. Memberikan pengetahuan kepada petani tentang perubahan iklim sehingga mereka dapat secara dini mengambil sikap dan tindakan terhadap perubahan. Misalnya melalui informasi dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) tentang perubahan hujan dan panas sehingga dapat mengantisipasi sejak dini dengan mengambil keputusan dan tindakan yang tepat.
4. Petani tetap aktif dalam kelompok tani, sehingga dapat mengatur kebutuhan pupuk kelompok untuk membuat RDKK sehingga dapat mengakses pupuk bersubsidi.
5. Petani melakukan pemasaran bersama untuk meningkatkan posisi tawar. (Seran, 2019)”



Gambar 5. Foto Bersama Dokter Muda pegawai tidak tetap PTT di Kabupaten Malaka



Gambar 6. Foto Bersama Masyarakat



Gambar 7. Foto Bersama Petugas Perbatasan

5. KESIMPULAN

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional harus dimulai dengan pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Pemenuhan ketahanan pangan lokal harus diperkuat dengan pembangunan ketahanan di sektor keluarga yang menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan nasional. “Kebijakan

peningkatan produksi tanaman pangan lokal merupakan salah satu sisi dari upaya mengatasi berbagai permasalahan kerawanan pangan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai daerah yang memiliki kondisi alam kering karena curah hujan yang sedikit. Daerah ini sering mengalami kerawanan pangan dengan berbagai implikasi seperti gizi buruk pada balita dan kelangkaan pangan.” Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi ketahanan pangan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

Kebijakan tersebut hanyalah sebuah dokumen pemikiran yang terkuras, dan sumber daya juga telah terbuang percuma tanpa mencapai hasil yang diharapkan. Program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) berdampak positif terhadap kinerja agronomi (padi, jagung, dan bawang merah) untuk meningkatkan produktivitas, produksi pertanian, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Faktor penghambat pelaksanaan Program RPM antara lain faktor internal (pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh program RPM) dan faktor eksternal (iklim, ketersediaan pupuk, rekomendasi teknologi tanam dan jarak tanam, penanaman tenaga kerja, dan produksi pertanian). Sifat musiman, daya simpan rendah (bawang merah), penanganan pasca panen yang tidak optimal, dan pemasaran.

Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian oleh Kabupaten Malaka secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap petani dan penyuluh melalui pelatihan, Bimbingan Teknis, kunjungan silang, magang, studi banding, pemberian informasi cuaca dan perubahan iklim. Petani didorong untuk membentuk badan pemasaran bersama terkait waktu tanam.

Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Program RPM dapat membentuk korporasi pertanian dalam pemasaran hasil pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih pada: “Program Hibah Penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Hibah Simlitabmas), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM-UKI, Kabupaten Malaka NTT, dan pihak-pihak lain yang telah membantu.”

DAFTAR PUSTAKA

References

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktik. Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*. Oxford University Press, doi:10.1093/jopart/mum032
- BP4D. (2017). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka 2017-2036*. Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Malaka.
- BKP. (2017). Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- BPS Malaka. (2018). *Malaka Dalam Angka*. Biro Pusat Statistik Kabupaten Malaka.
- BPS-NTT. (2014). Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur
- Iqbal, M. (2007). Analisis peran pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89-99
- Kennedy PSJ, Tobing SJL, Toruan RL, Heatubun AB (2021).

- 'Pengelolaan Perbatasan Maritim Indonesia dan Timor Leste: Dengan Pendekatan Militer atau Pendekatan Kesejahteraan?'. *Prosiding Acir* 2018, 348–354. doi: 10.5220/0010277003480354.
- LPM-Undana. (2016). *Grand Design Satu Desa Satu Produk Jalan Menuju Revolusi Pertanian Malaka*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana kerja sama Pemerintah Kabupaten Malaka.
- GD-RPM. (2016). *Grand Design Revolusi Pertanian Malaka*. Tim Penyusun GD RPM.
- Lassa, Jonatan. (2009). *Diskursus Kelaparan dan Ketahanan Pangan Indonesia 1958-2008: Studi Kasus Nusa Tenggara Timur, dalam 50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur*. Jonatan Lassa, Dion DB Putra, Tony Kleden (Editor), Kupang: PT Timor Media Grafika.
- Nursalam. (2020). Implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan lokal dan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 66-78
- Pakpahan A., dan Pasandaran E. (1990). *Keamanan Pangan: Tantangan dan Peluangnya*. Dalam Prisma Program Pembangunan Daerah NTT, No. 2 XIX Tahun 2004-2008. Jakarta: LP3ES.
- Priyanto D., dan Diwyanto, K. (2014). Pengembangan pertanian Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Republik Demokrasi Timor Leste. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 7(4), 207-220.
- Raydais AE, dan Damayanti M. (2018). Peran dan kapasitas stakeholder program rpm dalam mendukung ketersediaan pangan di Kecamatan Malaka Tengah. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 14(3), 143-155. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index>
- RPJMD-Malaka. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2016-2021*. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
- Rubiyo, Alihamsyah T., Bakrie B., Hendayana R. (2019). *Jelajah Inovasi Pertanian Wilayah Perbatasan*. IAARD Press
- Seran MN, Nursalam, Stefanus KY (2019). Dampak Kebijakan Revolusi Pertanian Malaka terhadap Produktivitas Ekonomi Masyarakat Kabupaten Malaka NTT. *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(1), 43-50. DOI: 10.29239/j.agrikan.12.1.43-50
- Suryana, Ahmad. 2008. *Pembangunan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia: Kebijakan dan Implementasinya*. Makalah yang diketengahkan pada Dialog Kebijakan Daerah Tingkat Tinggi, Bali: Un-Escap and Government of Indonesia.
- Timmer, C Peter. 2005. *Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Asia*. Dalam Asian Pacific TPHP, 2019. *Laporan Evaluasi RPM TA 2018*. Dinas TPHP Malaka.
- Trigutomo WH (2017). Strategi pembangunan ketahanan dan ketersediaan pangan tingkat lokal Nusa Tenggara Timur di tengah perubahan iklim melalui di SMK-pp negeri Kupang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 74-86.